

RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia

**Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi dan Muhammad
Thohir Yudha Rahimmadhi**

Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta

Alamat Email : ghifari.yuristiadhi@ugm.ac.id

Alamat Email: muhammadthohir.2019@student.uny.ac.id

Abstract

MasterCard Crescent Rating 2019 data shows Indonesia is the most popular halal tourist destination together with Malaysia. But on the other hand, in 2019 there was a rejection of Halal Tourism in several regions in Indonesia, namely Bali, South Sulawesi, North Sumatra and East Nusa Tenggara. This article tries to analyze why there is a rejection of halal tourism amid the growth of halal tourism in Indonesia. Is it more because of the recent strengthening of the wave of Islamism that has been mounted by practical political interests so that it presents its antithesis namely phobia as a form of cons of hegemony. So that the great potential of halal tourism itself is no longer seen as a great potential that can prosper anyone as a form of the universality of halal tourism. This analytical descriptive research with secondary data uses discourse analysis to answer the problem formulation with the concept of hegemony and identity politics. The conclusion of this article is that the rejection of halal tourism is significantly influenced by identity politics associated with political friction at the national and local level.

Keywords: *Halal Tourism, Rejection, Identity Politics, Islamism, Indonesia*

Intisari

Data MasterCard Crescent Rating 2019 menunjukkan Indonesia menjadi destinasi wisata halal terpopuler bersama Malaysia. Namun di sisi lain, pada kurun 2019 terjadi penolakan atas Wisata Halal di beberapa

wilayah di Indonesia sebut saja Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Artikel ini menganalisis mengapa terjadi penolakan wisata halal di tengah pertumbuhan wisata halal di Indonesia. Apakah lebih karena menguatnya gelombang Islamisme akhir-akhir ini yang tertunggangi kepentingan politik praktis, sebagai wujud hegemoni yang menghadirkan antitesisnya yakni fobia sebagai wujud konter hegemoni. Hal ini mengakibatkan potensi besar dari wisata halal tidak dilihat sebagai potensi besar yang bisa menyejahterakan siapapun sebagai wujud universalitas wisata halal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan data sekunder menggunakan analisis wacana untuk menjawab rumusan masalah dengan pisau iris konsep hegemoni dan politik identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan wisata halal secara signifikan dipengaruhi oleh politik identitas yang terkait dengan friksi politik di level nasional dan lokal.

Kata Kunci: Wisata Halal, Penolakan, Politik Identitas, Islamisme, Indonesia

Pendahuluan

Data Mastercard Crescent Rating 2019 menunjukkan Indonesia dan Malaysia masih bertengger di rangking satu sebagai destinasi terbaik untuk wisata halal dengan skor 78.¹ Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia tercatat unggul dalam indikator komunikasi dan pelayanan (makanan halal, tempat shalat dan bandara). Beberapa yang masih menjadi catatan perbaikan untuk Indonesia yaitu lingkungan (iklim, keamanan, larangan keyakinan dan pemasukan ekonomi), kemudahan akses (konektivitas, persyaratan visa, infrastruktur transportasi) dan pelayanan (pengalaman unik dan hotel).

Secara kuantitatif, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 207 juta seharusnya menjadi modal penting bagi dinamisasi Wisata Halal di Indonesia. Namun, beberapa waktu belakangan terjadi penolakan ramai-ramai atas wisata halal. Ada sesuatu yang kontradiktif di negara-negara minoritas Muslim yang justru melihat

¹ Crescent Rating, "The Global Muslim Travel Index 2019", <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>

wisata halal sebagai peluang. Sebut saja Jepang², Taiwan³, Thailand⁴, Singapura⁵ dan Korea Selatan.⁶

Ditilik lebih lanjut, penolakan atas wisata halal tersebut terjadi dalam rentang tahun 2019. Penolakan atas wisata halal setidaknya terjadi di Bali, destinasi Danau Toba di Sumatera Utara, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan destinasi Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Barat. Puncak penolakan di masing-masing tempat terjadi pada bulan yang berbeda dan muncul secara bergantian. Dari berbagai laman sosial media dapat dilihat bahwa penolakan di Bali terjadi pada Februari 2019, di Tana Toraja pada kurun Februari-Maret 2019, Labuhan Bajo pada Mei 2019 dan Danau Toba terjadi pada September 2019.

Dilihat dari kurun waktu penolakan wisata halal, dilakukan di sekitar periode kampanye, penetapan hasil, sengketa hasil hingga jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2019. Lokasi penolakan wisata halal berada di wilayah dengan muslim minoritas. Hal ini menguatkan indikasi bahwa muncul kontestasi politik identitas dibalik hadirnya penolakan atas wisata halal. Tulisan ini lebih jauh menganalisis seberapa signifikan kontesasi politik identitas berdampak pada penolakan wisata halal di Indonesia.

Sejak muncul konsep wisata halal pada awal 2010, berbagai reaksi akademisi muncul atas perkembangan wisata halal. Sebagian melihat dengan apatis bahwa wisata halal hanya menghadirkan komodifikasi agama dan eksklusifisme sehingga cenderung menolak. Pendapat ini disampaikan oleh Utama dan Awalia dalam tulisannya.⁷

2 Zakiah Samori, Nor Zafir Md Salleh, Mohammad Mahyuddin Khalida. "Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries" *Tourism Management Perspectives* 19, Part B, July 2016, Pages 131-136 dan JC Henderson "Muslim travellers, tourism industry responses and the case of Japan" *Journal Tourism Recreation Research* 41, no. 3 (2016) 339-347.

3 LF Wang, P Oktawirani, BK Liou, YM Jaw, Yu-Hsiu Tseng. "Investigation of Indonesian Muslim's dietary situations in Taiwan to explore the Muslim-friendly standards implementable in the non-Muslim society", *International Journal of Tourism and Hospitality Research* 33, no. 4, (2019) 99-111.

4 S Mansouri, "Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand" *International Conference on Law, Education and Humanities, Pattaya, Thailand*. (2014) dan A Nurdiansyah, "Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand", *The 1st International Conference on South East Asia Studies Proceeding 2016* (Universitas Gadjah Mada, 2018).

5 JC Henderson, "Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore", *Tourism Management Perspectives* 19, Part B, July (2016): 160-164.

6 I Eum, "The current state of Muslim-friendly tourism policies in non-Islamic countries: an exploratory study of Korea's approach" *International Journal Islamic Marketing and Branding* 3, No. 1, 2018: 65-81.

7 Wildan S Utama, "Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia

Utama mengatakan bahwa “agen” gaya hidup spiritual memainkan peranan penting dalam membantu dan membentuk kelas menengah perkotaan baru dalam mengkonsumsi Islam untuk menandakan identitas keislaman mereka. Gaya hidup spiritual (gaya hidup halal) ini merupakan salah satu contoh yang disinggung Utama. Esensi yang dia kritik yaitu proses komodifikasi agama yang dihasilkan perpaduan antara kesalehan Islam dan kapitalisme ini cenderung menyederhanakan Islam sebagai prosesi material daripada prosesi spiritual.

Awalina dengan menggunakan perspektif Michael Foucault tentang diskursus, kekuasaan dan konsep masyarakat konsumtif-nya Baudrillard, melakukan kritik terhadap jargon wisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menurutnya hanya dikomodifikasi oleh segelintir kelompok kepentingan. Awalina mengatakan bahwa wisata halal hanya menjadi “*panopticon*” (keranjang kuasa) gaya baru dalam dunia post-modern. Ia menambahkan bahwa wisata halal hanya jargon manis tentang kesejahteraan yang menurutnya tidak akan mungkin dinikmati oleh kalangan marjinal di NTB. Ia mengatakan juga bahwa wisata halal akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat karena prularitas suku yang ada di NTB.

Akademisi lain melihat wisata halal penting dikembangkan seiring berkembangnya gaya hidup baru yang religius. Pendapat ini disampaikan oleh Mohsin, dkk. dan Chandra. Menurut Mohsin dkk., wisata halal adalah sebuah “*emerging opportunities*” seiring berkembangnya segmen yang meminatinya. Ia mengatakan bahwa konsumen pariwisata halal adalah pengguna barang dan jasa yang memenuhi persyaratan halal. Maka kemudian minat spesifik dari konsumen ini sudah seharusnya dihormati oleh industri dengan mempertemukan minat spesifik konsumen dengan industri yang menyediakannya.⁸

Sedangkan Chandra melihat bahwa wisata halal merupakan “*new gold*”. Sebuah istilah untuk menggambarkan bahwa ada prospek yang sangat potensial untuk dikembangkan. Chandra mencatat bahwa populasi Muslim dunia telah tumbuh dengan cepat di seluruh dunia

Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20, no 2 (2015): 113-137 dan H Awalia 2017 “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no 1 (2017): 19-30.

8 A Mohsin, N Ramli, BA Alkhulayfi, “Halal Tourism: Emerging Opportunities”, *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137-143 dan GR Chandra, “Halal Tourism: A New Gold Mine for Tourism,” *International Journal of Business Management & Research* 4 (6), 45-62.

yang menghadirkan kebutuhan untuk mengembangkan produk dan layanan pariwisata halal yang disesuaikan untuk memenuhi segmen ini.⁹

Paper ini menawarkan kebaruan bahwa seiring munculnya potensi dari wisata halal yang menjanjikan, muncul anggapan bahwa wisata halal yang berkembang di negara mayoritas muslim seperti Indonesia ini hegemonik sehingga mengancam eksistensi umat agama lain. Meminjam istilah Gramsci, hegemoni merupakan perjuangan sebuah kelas yang berjaya untuk memaksa kelas masyarakat yang lain untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan nilai budaya kumpulan dominan.¹⁰ Hegemoni idealnya dilakukan oleh institusi negara sebagai ordinat yang memaksakan apa yang dipahaminya kepada masyarakatnya yang menjadi sub-ordinat. Namun dalam konteks wisata halal, tulisan ini melihat bahwa hegemoni dari wisata halal menghadirkan politik identitas dari wilayah-wilayah yang bukan mayoritas Islam untuk melakukan konter-hegemoni dengan melakukan penolakan atas wisata halal yang akan dikembangkan di wilayahnya. Momentum penolakan ini hadir dalam rangkaian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang menaikkan tensi politik nasional dan politik identitas di masing-masing daerah.

Penelitian deskriptif analitis ini menggunakan analisis wacana untuk menjawab rumusan masalah. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang berasal dari komentar beberapa pihak terkait yang diambil dari laman media daring yang diklasifikasikan dan dikrologiskan untuk memudahkan proses analisis.

Penolakan atas Wisata Halal di Berbagai Wilayah

Pada tahun 2019 terjadi penolakan atas wisata halal di empat wilayah di Indonesia. Kronologi penolakan atas wisata halal di empat wilayah tersebut sebagai berikut:

1. Bali

Wacana wisata halal di Bali muncul pertama kali saat Sandiaga Uno selaku calon Wakil Presiden berkampanye di Bali pada 24 Februari 2019. Ia mengatakan bahwa Indonesia tertinggal dari Thailand dalam

⁹GR Chandra, "Halal Tourism: A New Gold Mine for Tourism", *International Journal of Business Management & Research* 4 (6), 45-62.

¹⁰SY Ahmad, N Sulaiman, "Kedudukan Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Malaysia: Berakhirnya Era Hegemoni", *Prosiding Seminar Politik Malaysia*, 29 Februari-1 Maret 1992, (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008): 149.

pemanfaatan potensi besar wisata halal yang mencapai 3.000 triliun. Potensi ini bisa dimanfaatkan oleh Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata, tuturnya.¹¹ Statemen Sandiaga Uno direspon oleh berbagai kalangan di berbagai media dengan komentar yang beragam, antara lain dari Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Kepala Dinas Pariwisata Bali dan Ketua ASITA Bali yang menyampaikan ketidaksetujuannya.

Diolah dari *Detik.com*, *Tagar.id*, *Nusabali* Kepala Dinas Pariwisata Bali, AA Gede Yuniarta Putra pada 25 Februari 2019 mengatakan bahwa wisata halal tidak mungkin diterapkan dan tidak mungkin menjadi daya tarik wisata Bali. Wisata halal justru akan menghilangkan identitas pariwisata Bali. Seharusnya bisa berbagi peran dengan daerah lain seperti Lombok dan Aceh. Begitu juga Gubernur Bali, I Wayan Koster pada 26 Februari 2019 mengatakan bahwa branding pariwisata Bali sesuai kearifan lokal Bali. Karakter pariwisata Bali adalah wisata budaya. Wisata halal mempersempit branding wisata budaya Bali. Di hari yang sama, Ketua ASITA Bali, I Ketut Ardana mengatakan bahwa pariwisata Bali sudah memiliki identitas yakni budaya. Budaya Bali adalah magnet wisatawan datang. Wisata halal bisa dikembangkan di luar Bali. Sehari berikutnya Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan bahwa wisata halal jika dipaksakan dapat menyebabkan kemunduran pariwisata Bali. Semua pelaku wisata Bali menolak konsep wisata halal. Daya tarik wisata Bali di mata internasional adalah wisata budaya.

2. Tana Toraja

Tidak berselang lama dari munculnya wacana dikembangkannya wisata halal di Bali yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, muncul statemen serupa oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada 25 Februari 2019. Ia mengatakan bahwa Tana Toraja yang merupakan destinasi wisata banyak dikunjungi wisatawan termasuk wisatawan muslim. Keberadaan Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan yang masyarakat banyak beragama Islam, menjadi pertimbangan perlunya membangun kawasan wisata halal. Wakil Gubernur melanjutkan bahwa banyak negara non-muslim yang juga memiliki kawasan wisata halal seperti Jepang, Cina, Hongkong, Thailand, Selandia Baru. Negara-negara tersebut mengembangkan wisata kuliner halal, kenapa hal serupa tidak memungkinkan direalisasikan di Tana Toraja.¹²

11 Alfian Putra Abdi, "Betapa Tak Masuk Akalnya Rencana Sandi Bikin Wisata Halal di Bali, *Tirto*, 25 Februari 2019.

12 Nurjamil, "Pemprov Sulawesi Selatan Dorong Pengembangan Wisata

Pernyataan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan direspon masyarakat yang tergabung dalam Forum Permerhati Budaya Toraja (FPBT) dengan memasang spanduk penolakan atas wacana wisata halal di berbagai titik di Kabupaten Tana Toraja, antara lain perbatasan masuk Toraja di Salubarani, Kecamatan Mengkendek Tana Toraja, Mengkendek, Kolam Makale, kantor Bupati Tana Toraja dan Tetebasi Makale Utara.

Penolakan atas wisata halal juga muncul dari Aliansi Masyarakat Toraja Bersatu pada 13 Maret 2019. Kelompok masyarakat ini menuntut tiga hal: (1) menolak dengan keras penerapan wisata halal di Tana toraja dan Toraja utara; (2) mendesak Pemda dan DPRD Tana Toraja untuk menentukan sikap menolak wisata halal secara tertulis dan resmi dalam kurun waktu 2x24 jam dan (3) mendesak Kadis Parawisata Tana Toraja untuk mencabut pernyataan di media yang menyatakan sikap menyetujui penerapan wisata halal.¹³

Informasi yang diperoleh dari *Kareba Toraja*, *Bacapesan.com*, *Toraja Daily* dan *Rakyatsatu* menjelaskan Rohaniwan Katolik, Yans Sulo Paganna', Pr. pada 2 Maret 2019 mengatakan bahwa wacana wisata halal tidak menghormati dan menghargai masyarakat Tana Toraja. Tidak mungkin semua kebutuhan wisatawan disediakan, termasuk wisata halal untuk muslim. Sebaiknya ide wisata halal untuk wilayah lain di luar Tana Toraja. Lima hari kemudian, Ketua FBPT, Edy Pasang Allo mengatakan bahwa masyarakat adat Tana Toraja menolak dengan keras wacana wisata halal. Pada 11 Maret 2019, Anggota DPRD Tana Toraja, Yariana Somalinggi dan Nico Mangera mengatakan bahwa tanpa label halal, Tana Toraja sejak dahulu hidup rukun. Sangat menyayangkan wacana ini keluar pada masa politik sehingga wacana wisata halal ditolak. Di hari yang sama, pada saat unjuk rasa, koordinator aksi, Pradyan Reski Londongallo mengatakan bahwa aksi menolak wisata halal ini untuk mempertahankan adat dan budaya Tana Toraja dan bukan atas nama agama dan tidak ditunggangi siapapun.

Pada waktu sebelum muncul spanduk-spanduk yang mencantumkan penolakan atas wacana wisata halal, Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara pada 27 Februari 2019 telah mencoba meluruskan bahwa ada salah tafsir atas pernyataan dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan perihal akan dijadikannya Tana Toraja

Halal Toraja", *GoMuslim*, 25 Februari 2019.

13 Tim Editor, "Ratusan Pemuda dan Warga Toraja Tolak Wisata Halal", *Kumparan*, 11 Maret 2019.

sebagai destinasi halal. Ia menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat Tana Toraja juga menyediakan kuliner halal untuk wisatawan muslim yang datang ke Toraja, bukan seluruh restoran dirubah menjadi restoran halal.

3. Labuhan Bajo

Kegiatan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata RI bersama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 30 April 2019 di Labuan Bajo yang membahas tentang wacana penerapan wisata halal di Labuhan Bajo, direspon dengan penolakan oleh masyarakat.¹⁴ Penolakan ini dilontarkan oleh Wakil Gubernur NTT, Gereja Katolik Manggarai, Ketua ASITA NTT, Anggota DPR RI daerah pemilihan NTT dan elemen mahasiswa.

Diolah dari *Kompas.com*, *IndonesiaKoran.com*, *Kumparan*, *Pos-Kupang.com*, *CNNIndonesia*, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae pada 4 Mei 2019 mengatakan bahwa wacana wisata halal ditolak karena NTT berbeda dengan daerah lain. Wacana wisata halal merupakan wujud merusak toleransi. Selama ini hubungan Kristen dan Islam baik-baik saja. Sehari kemudian, Ketua Himpunan Mahasiswa Pariwisata Manggarai Bali (HMPMB), Yones Capur mengatakan bahwa penerapan wacana wisata halal di NTT tidak tepat sasaran. Penerapan wisata halal harus sesuai dengan budaya lokal yang menjadi penciri. Labuhan Bajo membuka diri untuk wisatawan muslim tetapi tidak perlu label halal. Banyak kuliner halal di Labuhan Bajo. Pada 6 Mei 2019, Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr. Silvester San melalui surat menyampaikan bahwa wacana wisata halal telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat NTT dan berpotensi menumbulkan konflik sosial. Gagasan wisata halal bersifat eksklusif, tidak menghormati kebhinnekaan dan kemajemukan. Wisata halal tidak sesuai dengan kebudayaan lokal Manggarai. Di hari yang sama, Anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng Bapa menyampaikan bahwa wacana wisata halal merupakan bentuk pemaksaan kepentingan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Wisata halal bisa diterapkan di wilayah lain tetapi bukan di NTT. Selang sehari, Ketua ASITA NTT, Abed Frans juga menyampaikan bahwa NTT bukan destinasi khusus bagi yang halal saja. Ciri khas NTT berupa aktivitas *adventure*.

Pada 10 Mei 2019, Frans Nambut, Kepala Seksi Pemasaran Dinas Pariwisata Manggarai Barat, memberikan klarifikasi bahwa sosialisasi

¹⁴ Oby Lewanmeru, "Ini Desakan BP Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores. *Pos-kupang.com*, 7 Mei 2019.

yang dilakukan adalah inisiatif Seksi Pemasaran yang melibatkan berbagai industri dan pengusaha pariwisata. Tujuan diselenggarakan sosialisasi tersebut untuk membuka peluang pengembangan fasilitas halal bagi wisatawan yang datang ke Labuhan Bajo sebagai *extended service* untuk segmen yang berbeda dan bukan dalam rangka merubah konsep wisata yang ada di NTT.

4. Danau Toba

Statemen Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang menyinggung tentang wacana pengembangan wisata halal di kawasan wisata Danau Toba dengan menertibkan ternak babi menjadi pemantik penolakan. Muchlis, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara mendukung statemen Gubernur, bahwa wisata halal yang diwacanakan di kawasan Danau Toba dalam rangka mengembangkan amenitas yang seharusnya dipenuhi destinasi. Harapannya wisatawan bisa kembali karena merasa terfasilitasi dengan baik.¹⁵

Wacana Gubernur tersebut ditentang oleh banyak kalangan, salah satunya massa Mahasiswa Pecinta Danau Toba yang menggelar aksi di depan kantor Badan Otorita Pelaksana Danau Toba Jalan Patimura Medan. Rico Nainggolan selaku koordinator aksi mengkritik Gubernur yang tidak peka dengan kondisi sosial budaya kawasan Danau Toba. Lebih khusus tentang babi, menurutnya babi merupakan hewan sangat penting dalam adat Toba.¹⁶ Dalam aksi tersebut massa membentangkan spanduk bertuliskan "Danau Toba Tidak Butuh Label Halal".

Respon senada juga diberikan oleh Anggota DPR dari Dapil Sumut II, Sihar Sitorus pada 5 September 2011. Ia mengatakan bahwa wisata halal yang diwacanakan Gubernur Sumatera Utara menciptakan segregasi antar umat beragama dan suku bangsa. Ia mengingatkan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan jangan sampai terjadi diskriminasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah atas masyarakat yang dipimpinnya.

Penolakan Wisata Halal dan Sentimen Politik Identitas

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bagian sebelumnya,

15 Yan Muhardiansyah, "Demo Gubernur Sumut, Mahasiswa Tolak Konsep Wisata Halal di Danau Toba", *Merdeka*, 2 September 2019.

16 Budi Warsito, "Mahasiswa Pecinta Danau Toba Aksi Tolak Wisata Halal", *detikNews*, 2 September 2019.

tulisan ini melihat terjadi kontestasi politik identitas dalam fenomena penolakan wacana wisata halal yang muncul di empat wilayah di Indonesia dalam kurun 2019. Politik identitas tersebut terbangun dari relasi mayoritas dan minoritas agama dan aspirasi politik praktis.

Politik identitas mengutip Sarup dalam Rahayu adalah:

*"all identities, whether based on class, ethnicity, religion or nation, are social constructions... Though identity may be constructed in many different ways, it is always constructed in the symbolic, that is to say, in language"*¹⁷

Menurut Rahayu, politik identitas adalah "produksi identitas-identitas melalui penciptaan tempat-tempat atau posisi-posisi subyek dalam lingkungan sosial beserta tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan subyek sesuai dengan tempat dan posisinya tersebut". Jika kedua definisi tersebut digunakan untuk membaca yang terjadi dengan penolakan wacana wisata halal, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kontroversi sehingga menghadirkan polemik adalah diksi "halal" dari terminologi agama yang menjadi kata sifat dari "wisata" sehingga menghadirkan definisi baru yang dianggap kontroversial karena memuat simbol agama.

Terkait dengan sensitifitas agama, jika ditilik dari empat lokasi terjadinya penolakan atas wisata halal di empat wilayah di Indonesia, secara statistik kependudukan, keempat wilayah tersebut merupakan wilayah yang jumlah penduduk muslim minoritas. Di Provinsi Bali, 83.5% dari 4,225,384 (Sensus 2010) penduduknya beragama Hindu sedangkan pemeluk agama Islam hanya 13,37%.¹⁸ Sedangkan di Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten tahun 2017, menunjukkan bahwa 64.74% penduduk memeluk Kristen Protestan, 18.68% memeluk Katolik dan pemeluk Islam hanya 12.76%.¹⁹ Selanjutnya, Labuhan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat NTT dengan populasi penduduk 263.207 jiwa (Sensus 2017) dengan mayoritas adalah Katolik 78,16% dan Kristen Protestan 0,77%. Sedangkan yang agama Islam hanya sejumlah 20,98%.²⁰ Sedangkan Danau Toba yang menjadi bagian dari wilayah 7 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Samosir, Karo, Simalungu, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Dalri dengan mayoritas irisan wilayah terbesar di Kabupaten Samosir dan Toba

17 TP Rahayu, "Politik Identitas Anak-Anak dalam Iklan Anak-Anak", *Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 19, no. 2 (2006) : 1-17.

18 <https://en.wikipedia.org/wiki/Bali#Religion>

19 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja#Agama

20 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat#Agama

Samosir. Tidak ditemukan jumlah penduduk berdasarkan agama di Samosir dari total 124.647 jiwa. Sedangkan di Toba Samosir, dari 180.407 hasil Sensus 2010 diketahui pemeluk Kristen Protestan sebesar 85.42%, Kristen Katolik 6.60%, sedangkan Islam hanya 6.20%.²¹

Relasi mayoritas dan minoritas dalam merespon wacana yang muncul ke publik ini menghadirkan konflik karena ketersinggungan identitas yang hadir seiring digunakannya terminologi yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat lainnya. Identitas etnis, ras, kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas, disabilitas, usia, ideologi dan penanda sosial membangun *self image* sebagai stereotipe. Terlebih hal tersebut dilontarkan oleh mayoritas kepada minoritas.²² Hadirnya wacana wisata halal dianggap oleh mayoritas di wilayah penolakan sebagai upaya menghegemoni mayoritas dengan sebuah identitas yang tidak melekat pada diri mereka. Oleh karena itu mereka menolak mentah-mentah.

Terkait dengan hadirnya wacana wisata halal di keempat wilayah yang terjadi penolakan ada perbedaan kronologis. Sebagaimana telah dideskripsikan di bagian tulisan sebelumnya, rangkaian penolakan atas wisata halal bermula dari Bali. Saat Sandiaga Uno selaku calon Wakil Presiden berkampanye di Bali pada 24 Februari 2019.²³ Respon atas penolakan wacana wisata halal memang sarat dengan muatan politik identitas. Momentum kampanye presiden dan wakil presiden yang sangat membelah dan mendikotomi dua kubu yang memang tersegregasi utamanya dari perbedaan identitas, khususnya agama seiring wacara yang terus dibangun selama kampanye merupakan kontestasi antara representasi nasionalis yang diwakili kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01 melawan Islam yang diwakili kubu calon presiden dan calon wakil presiden 02.

Begitu juga dengan aksi-aksi umat Islam yang berjilid, salah satunya 212, yang merespon berbagai peristiwa politik di level nasional yang tanpa disadari menghadirkan gambaran hegemoni mayoritas atas minoritas.²⁴ Begitu juga menguatnya identitas Islam di ruang publik yang juga menghadirkan ekspresi keagamaan dalam berwisata dalam wisata halal ini. Islamisme yang menguat ini dilihat sebagai

21 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toba_Samosir#Agama

22 A Gutmann, "Introduction: The Good, the Bad, and the Ugly of Identity Politics" in *Identity in Democracy*. (Princeton University Press, 2009).

23 Alfian Putra Abdi, "Betapa Tak Masuk Akalnya Rencana Sandi Bikin Wisata Halal di Bali, *Tirto*, 25 Februari 2019.

24 Masduki Masduki, "Masa Depan Studi Agama-Agama Di Indonesia Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 212", *Toleransi* 10, no 1 (2018): 1-17.

ancaman bagi minoritas. Maka, ketika mereka menjadi mayoritas di kabupaten/wilayahnya masing-masing, aksi hegemonik yang sama pun ditampilkan.

Dengan demikian, penolakan wisata halal yang terjadi cukup masif hadir bersamaan dengan dukungan pada calon presiden dan wakil presiden 01 karena yang melontarkan isu ini dari kubu 02 sekaligus wujud kontra hegemoni di level nasional. Hasil akhir rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden di Provinsi Bali oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan Pasangan nomor 01 memperoleh 2.351.057 suara atau 91,68 persen. Sedangkan pasangan nomor 02 hanya meraih 213.415 suara atau 8,32 persen.²⁵

Memperhatikan statemen dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang menyebut secara eksplisit kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bahwa, "Halal tourism enggak mungkin, sangat jauh dari itu walaupun Sandiaga menjadi (wakil) presiden itu enggak mungkin. Turis datang ke sini bukan karena halal tourism (tapi) karena budaya Bali, apa kita menghilangkan?"²⁶ bisa dikatakan bahwa penolakan ini sekaligus menunjukkan sikap politik sekaligus hegemoni bahwa Bali memiliki identitas budaya (dan juga agama) yang tidak sejalan dengan konsep wisata halal yang berasal dari Islam.

Sama halnya yang terjadi dengan di Tana Toraja dan Labuhan Bajo yang juga masih berlangsung di sekitar pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga menjadi pemantik provokasi. Wacana Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang disampaikan pada 25 Februari 2019 yang mengatakan bahwa Tana Toraja perlu membangun kawasan wisata halal ditanggapi dengan penolakan dan demonstrasi. Sedangkan di Labuhan Bajo muncul pasca-kegiatan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 April 2019 lalu yang menyinggung tentang wacana penerapan wisata halal di Labuhan Bajo. Bahkan, Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng pun merasa harus turun tangan memberikan pendapat dalam bentuk surat penolakan wisata halal yang ditujukan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuhan Bajo-Flores.²⁷

Penolakan wisata halal di Tana Toraja dan Labuhan Bajo

25 Fitria Chusna Farisa, "Rekapitulasi KPU: Di Bali Suara Jokowi-Ma'ruf 2,3 Juta", Prabowo-Sandiaga 213 Ribu, *Kompas.com*, 10 Mei 2019.

26 Tim Editor, "Gubernur Bali Tolak Ide Sandi soal Wisata Halal di Pulau Dewata", *Kumparan*, 26 Februari 2019.

27 Tim Editor, "Keuskupan Ruteng Tolak Konsep Wisata Halal di Labuan Bajo", *Kumparan*, 6 Mei 2019.

dibenturkan dengan budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan wisata halal tersebut. Wacana wisata halal sebagai bentuk islamisasi yang mengancam eksistensi mayoritas menjadi isu efektif yang dikomodifikasi saat pemilihan presiden dan wakil presiden di kedua kabupaten ini karena pernah diwacanakan oleh salah satu calon wakil presiden yang dianggap representasi dari Islam. Hasil akhir rekapitulasi suara di Kabupaten Manggarai Barat, pasangan 01 memperoleh 112.171 suara (82.36%) sedangkan pasangan 02 meraih 24.018 suara (17.64%). Sedangkan di Kabupaten Tana Toraja, pasangan 01 mendapatkan 15.984 suara (12.01%) dan pasangan 02 memperoleh 117.051 suara (87.99%).²⁸

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Sumatera Utara karena dilaksanakan setelah pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun tidak dipungkiri, Pilkada Sumatera Utara yang berlangsung setahun sebelumnya masih menyisakan dendam antara kubu Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus melawan Edy Rahmayadi-Musa Rajeksyah. Di wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Dana Toba seperti Samosir, Karo, Toba Samosir, Dairi, Pematangsiantar, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus menang telak. Namun hasil akhir menunjukkan bahwa Edy Rahmayadi-Musa Rajeksyah memenangi Pilkada karena memenangkan di kabupaten lain. Maka, saat Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang menyinggung tentang wacana pengembangan wisata halal di kawasan wisata Danau Toba dengan menertibkan ternak babi menghadirkan penolakan besar-besaran dari masyarakat di sekitar Danau Toba yang notabene bukan pemilihnya.

Sentimen politik identitas berujung pada penolakan atas wisata halal, jika ditilik bermula dari kesalah pahaman menangkap wacana yang dilontarkan dan terburu-buru merespon dengan menolak karena kurang paham konsep wisata halal itu sendiri. Kasus penolakan di Bali tidak didahului dengan klarifikasi seperti apa konsep wisata halal yang bisa dikembangkan di Bali agar kompetitif dengan Thailand sebagaimana yang disampaikan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Di Tana Toraja, statemen Wakil Gubernur yang menjadi kontroversial kemudian diluruskan oleh Bupati Tana Toraja bahwa bukan kemudian karakter pariwisata Tana Toraja akan berubah secara signifikan dengan hadirnya wisata halal, namun hanya bagaimana warga lokal menyiapkan fasilitas-fasilitas khususnya restoran halal yang representatif.

Di Labuhan Bajo, Dinas Pariwisata Manggarai Barat mengakiri

28 <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/>

polemik dengan memberikan penjelasan bahwa bimbingan teknik itu memang atas inisiatif Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dengan mengundang pengusaha lokal dalam rangka membuka kemungkinan pengusaha menambah fasilitas halal, yang punya prospek dengan produk Labuan Bajo. Begitu juga di Danau Toba, inti dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara bagaimana melakukan pengembangan amenities wisata halal. Dengan amenities halal yang dimiliki, diharapkan wisatawan asing, khususnya dari Malaysia yang jumlahnya lebih dari 50% dari total tamu asing yang datang ke Danau Toba dapat merasa puas. Harapannya bisa datang kembali ke Danau Toba.

Penutup

Penolakan wisata halal di empat wilayah di Indonesia dalam kurun tahun 2019 yakni di Bali, Tana Toraja, Labuhan Bajo dan Danau Toba dibalut dengan sentimen politik identitas dalam suasana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 dan pasca-pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 serta relasi mayoritas-minoritas. Sentimen politik identitas mudah dihembuskan dalam suasana panas kontestasi politik, terlebih “wisata halal” yang menjadi representasi ajaran Islam dianggap hegemonik dan menantang saat diwacanakan di wilayah minoritas muslim. Selain itu, hadirnya penolakan atas wisata halal di keempat wilayah tersebut dikarenakan pemahaman yang kurang memadai tentang wisata halal yang hanya menganggap sebagai bentuk Islamisasi yang melanggar nilai-nilai kebhinnekaan, toleransi dan penghormatan atas budaya dan agama yang dianut mayoritas lokal.

Daftar Bacaan

- Abdi, Alfian Putra. “Betapa Tak Masuk Akalnya Rencana Sandi Bikin Wisata Halal di Bali, *Tirto*, 25 Februari 2019.
- Ahmad, S. Y., and Nidzam Sulaiman, “Kedudukan Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Malaysia: Berakhirnya Era Hegemoni”, *Prosiding Seminar Politik Malaysia, 29 Februari-1 Maret 1992*, (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008): 149.
- Awalia, Hafizah. 2017 “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia”, *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no 1 (2017): 19-30.

- Chandra, Geetanjali Ramesh. "Halal Tourism: A New Gold Mine for Tourism", *International Journal of Business Management & Research* 4 (6), 45-62.
- Crescent Rating, The Global Muslim Travel Index 2019, <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>
- Eum, Ikran. "The current state of Muslim-friendly tourism policies in non-Islamic countries: an exploratory study of Korea's approach" *International Journal Islamic Marketing and Branding* 3, no. 1 (2018): 65-81.
- Farisa, Fitria Chusna. Rekapitulasi KPU: Di Bali Suara Jokowi-Ma'ruf 2,3 Juta, Prabowo-Sandiaga 213 Ribu, *Kompas.com*, 10 Mei 2019.
- Gutmann, Amy, "Introduction: The Good, the Bad, and the Ugly of Identity Politics" *Identity in Democracy*. (Princeton University Press, 2009).
- Henderson, Joan C. "Muslim travellers, tourism industry responses and the case of Japan" *Journal Tourism Recreation Research* 41, no. 3 (2016) 339-347.
- Lewanmeru, Oby. "Ini Desakan BP Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo-Flores. *Pos-kupang.com*, 7 Mei 2019.
- Mansouri, S. "Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand", *International Conference on Law, Education and Humanities, Pattaya, Thailand*. (2014): 30-31.
- Masduki, M. "Masa Depan Studi Agama-Agama Di Indonesia Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 212", *Toleransi* 10, no 1 (2018): 1-17.
- Mohsin, A., Ramli, N., Alkhulayfi B. A., "Halal Tourism: Emerging Opportunities", *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137-143.
- Muhardiansyah, Yan. "Demo Gubernur Sumut, Mahasiswa Tolak Konsep Wisata Halal di Danau Toba", *Merdeka*, 2 September 2019.
- Nurjamal, N. "Pemprov Sulawesi Selatan Dorong Pengembangan Wisata Halal Toraja", *GoMuslim*, 25 Februari 2019.
- Rahayu, Titik Puji. "Politik Identitas Anak-Anak dalam Iklan Anak-Anak", *Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 19, no. 2 (2006) : 1-17.
- Samori, Z., Salleh, NZM., Khalida, M. M. "Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries" *Tourism Management Perspectives* 19, Part B, July 2016: 131-136.

- Tim Editor, "Gubernur Bali Tolak Ide Sandi soal Wisata Halal di Pulau Dewata", *Kumparan*, 26 Februari 2019.
- Tim Editor, "Keuskupan Ruteng Tolak Konsep Wisata Halal di Labuan Bajo", *Kumparan*, 6 Mei 2019.
- Tim Editor, "Ratusan Pemuda dan Warga Toraja Tolak Wisata Halal", *Kumparan*, 11 Maret 2019.
- Utama, Wildan Sena. "Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia". *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20, no 2 (2015): 113-137.
- Wang L. F., Oktawirani P., Liou B. K., Jaw Y. M., Tseng, Y. H. "Investigation of Indonesian Muslim's dietary situations in Taiwan to explore the Muslim-friendly standards implementable in the non-Muslim society", *International Journal of Tourism and Hospitality Research* 33, no. 4, (2019): 99-111.
- Warsito, Budi. "Mahasiswa Pecinta Danau Toba Aksi Tolak Wisata Halal", *DetikNews*, 2 September 2019.

Sumber Lain

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Bali#Religion>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja#Agama
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat#Agama
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toba_Samosir#Agama
- Crescent Rating, "The Global Muslim Travel Index 2019",